



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*), pada tanggal 23 Oktober 2017 di Pampanga, Filipina;

c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2017 di Pampanga, Filipina.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Khmer, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 237728 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)**

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2017 di Pampanga, Filipina, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:

1. tujuan dibuatnya Persetujuan;
2. ruang lingkup kerja sama mencakup:
 - a. dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama;
 - b. pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata;
 - c. pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata;
 - d. pertukaran informasi dalam intelijen militer;
 - e. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan;
 - f. meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata;
 - g. meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. bidang lain yang disepakati bersama.
3. otoritas berwenang yang ditugasi melaksanakan Persetujuan;
4. perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
5. pengaturan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
6. penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan;
7. ketentuan mengenai amendemen; dan
8. ketentuan mengenai pemberlakuan dan pengakhiran Persetujuan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7007



RE.PUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada antara kedua negara melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan dalam semangat ASEAN, saling percaya, dan saling pengertian;

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak akan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, memahami, dan bekerja sama dalam hubungan internasional;

Mengakui hubungan jangka panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam berbagai bidang kerja sama pertahanan dan militer;

Memperhatikan bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan memberikan kontribusi yang saling menguntungkan pada hubungan pertahanan nasional kedua negara;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah menyediakan kerangka kerja umum untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak dalam pertahanan, berdasarkan prinsip kesetaraan, manfaat bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Persetujuan ini mencakup

1. dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama;
2. pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata;
3. pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata;
4. pertukaran informasi dalam intelijen militer;
5. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan;
6. meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata;
7. meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; dan
8. bidang-bidanglain yang disepakati bersama.

PASAL 3 OTORITAS BERWENANG

Otoritas berwenang yang ditugasi melaksanakan Persetujuan ini adalah

1. Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan,
2. Untuk pihak Kamboja: Kementerian Pertahanan Nasional.

PASAL 4 PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pemindahan yang tidak sah atas hak-hak kekayaan intelektual yang dipindahkan, dipertukarkan, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara mereka

dan kesepakatan internasional lain dimana negara mereka menjadi Pihak.

2. Pelindungan dan pendistribusian hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan hak sah pihak ketiga, serta pembagian kepemilikan yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing Pihak, diatur oleh Para Pihak melalui pengaturan tertulis terpisah pada bidang kerja sama tertentu.

PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung biaya sendiri terkait pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap masalah yang timbul dari interpretasi atau implementasi dari Persetujuan ini diselesaikan secara damai antara Para Pihak.

PASAL 7 AMENDEMENT

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak dan menjadi Protokol terpisah sebagai bagian yang terintegrasi dengan Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir tentang pemenuhan prosedur internal negara yang diperlukan oleh Para Pihak.

PASAL 8 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh Para Pihak, sebagai syarat pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Setiap kerja sama sebelumnya antara Para Pihak tetap berlaku di bawah Persetujuan ini, kecuali jika kerja sama tersebut tidak sesuai dengan semangat Persetujuan ini.

3. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberi tahu secara tertulis melalui saluran diplomatik paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhirannya.
4. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu kegiatan yang sedang berlangsung sebelum pengakhiran tersebut, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Pampanga pada tanggal 23 Okt tahun 2017 dalam bahasa Indonesia, ~~bahasa~~ Khmer, dan bahasa Inggris; semua naskah autentik. Jika terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**



**RYAMIZARD RYACUDU
MENTERI PERTAHANAN**

**UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN KAMBOJA,**



**SAMDECH PICHEYSENA TEA BANH
WAKIL PERDANA MENTERI,
MENTERI PERTAHANAN NASIONAL**



REPUBLIK INDONESIA

កិច្ចព្រមព្រៀង

រវាង

រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

និង

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្តីពី

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិ

រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលជាមួយ ហៅថា “គូភាគី”

ដោយមានគោលបំណងពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យការពារជាតិ ក្នុងស្មារតីជឿជាក់ និងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក រវាងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន

ដោយគូសបញ្ជាក់នូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងមានការវិវឌ្ឍន៍រវាងគូភាគីដែលនឹងរួមចំណែកដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ តាមមធ្យោបាយបង្កើតនូវជំនឿទុកចិត្ត និងការយោគយល់គ្នា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ដោយទទួលស្គាល់នូវទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី និង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើវិស័យនានានៃកិច្ចការពារជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលទាក់ទងនឹងផ្នែកយោធា

ដោយកត់សំគាល់ឃើញថា ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ នឹងរួមចំណែកដល់ទំនាក់ទំនងដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលើវិស័យ ការពារជាតិ នៃប្រទេស ទាំងពីរ។

ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរ គូភាគីបានឯកភាពគ្នាដូចខាងក្រោម៖

មាត្រា ១

គោលបំណង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានគោលបំណងផ្តល់នូវក្របខណ្ឌទូទៅដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យការពារជាតិរវាងគូភាគី តាមបណ្តាវិស័យដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ សមភាព ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងការគោរពពេញលេញនូវអធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដី។

មាត្រា ៥
ការរៀបចំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិនបើពុំមានការសម្រេចចិត្តផ្សេងពីនេះដោយគូភាគី ភាគីនីមួយៗត្រូវទទួលបន្ទុកលើការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងយោងទៅតាមវិភាជន៍ថវិការបស់ខ្លួន ។

មាត្រា ៦
ដំណោះស្រាយវិវាទ

រាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបកប្រែ ឬការអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវដោះស្រាយដោយការយោគយល់គ្នារវាងគូភាគី។

មាត្រា ៧
ការធ្វើវិសោធនកម្ម

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអញ្ជើញបានធ្វើវិសោធនកម្ម ឬកែសម្រួល ដោយផ្អែកលើការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមករបស់គូភាគី នឹងប្រកួបប្រួលពិធីសារដោយឡែកមួយ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង នេះ។ ពិធីសារនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីពេលទទួលបានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចុងក្រោយ នៃការបំពេញនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរដ្ឋចាំបាច់ ដោយគូភាគី។

មាត្រា ៨
ការចូលជាធរមាន និងការបញ្ចប់

១. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹងចុងក្រោយ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមផ្លូវការទូត លើសមិទ្ធផលដោយគូភាគីនូវនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ ផ្ទៃក្នុងរដ្ឋដែលចាំបាច់ សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន។

២. រាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីមុនរវាងភាគីទាំងពីរ រក្សាសុពលភាពដដែលក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លុះត្រាតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនោះមិនស្របតាមស្មារតីដែលមានចែង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៣. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេល៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងត្រូវបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រយៈពេល៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ភាគីណាមួយក្នុងចំណោមភាគីទាំងពីរអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមផ្លូវការទូតយ៉ាងតិចរយៈពេល៦ (ប្រាំមួយ) ខែ មុនកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង តាមបំណងរបស់ខ្លួន។

មាត្រា ២
វិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

វិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចរួមមាន៖

១. កិច្ចសន្ទនា និងការពិគ្រោះយោបល់ទូទៅជាទៀងទាត់លើយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិ និងបញ្ហាយោធា នៃផលប្រយោជន៍រួម។
២. ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងស្ថាប័នការពារជាតិ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
៣. ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរសន្ទនាស្តីពីយោធាជាន់ខ្ពស់ រួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
៤. ការផ្លាស់ប្តូរក៏មានចរកម្មយោធា
៥. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មការពារជាតិ
៦. ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
៧. លើកកម្ពស់ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យការពារជាតិ និងយោធាតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺន និង
៨. វិស័យផ្សេងៗទៀតដែលបានឯកភាពគ្នា។

មាត្រា ៣
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបានអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺ៖

១. សម្រាប់ភាគីឥណ្ឌូនេស៊ី : ក្រសួងការពារជាតិ
២. សម្រាប់ភាគីកម្ពុជា : ក្រសួងការពារជាតិ

មាត្រា ៤
ការការពារសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

១. គូភាគីត្រូវទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ និងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ចំពោះការផ្ទេរ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការបង្កើតដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយយោងតាមច្បាប់ជាតិ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃ សាមីប្រទេស ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៃប្រទេសនីមួយៗ។

២. ការការពារ និងការចែកចាយសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា រួមបញ្ចូលការការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ ភាគីទីបី រួមទាំងការពិចារណាអំពីចំណែកនៃកម្មសិទ្ធិភាព ដោយផ្អែកលើការចូលរួមចំណែករបស់ គូភាគី នឹងត្រូវធ្វើឡើង តាមការរៀបចំដាច់ដោយឡែកជាលាយលក្ខណ៍ដោយគូភាគី នៅក្នុងវិស័យជាក់លាក់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

៤.ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពឬថេរវេលា នៃសកម្មភាពនានាដែល
បាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង លុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងដោយគូភាគី។

ដើម្បីជាសក្ខីភាព ហត្ថលេខីខាងក្រោម ដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញដោយរដ្ឋាភិបាល របស់ខ្លួន
បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ធ្វើនៅ ថ្ងៃទី ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ជាភាសាខ្មែរ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី និងភាសាអង់គ្លេស
ដែលអត្ថបទទាំងអស់មានតម្លៃស្មើគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់។ ករណីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការបកប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវយកជាគោល។

សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



វិយ៉ាមីហ្សាង វិយ៉ាដូឌុ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ

សម្តេចពិជ័យសេនា ឡៅ ប្រាក់
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងការពារជាតិ



RE PUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE ROYAL GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
CONCERNING
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries through cooperative activities in the field of defence in the spirit of ASEAN, mutual trust and understanding;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Recognizing the long-lasting relationship between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia on various fields of defence and military-related cooperation;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 PURPOSE

The purpose of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement may include:

1. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic defence and military issues of common interest;
2. Exchange of visits between defence and Armed Forces agencies;
3. Exchange of the visits of the high ranking official, including Armed Forces;
4. Exchange of information in the military intelligence;
5. Cooperation in science and technology in defence industry;
6. Promoting cooperation of the Armed Forces;
7. Promoting capacity building in the field of defence and military through education and training programs; and
8. Other mutually agreed areas.

ARTICLE 3 COMPETENT AUTHORITIES

The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:

1. For Indonesian side: The Ministry of Defence;
2. For Cambodian side: The Ministry of National Defence.

ARTICLE 4 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of under this Agreement in accordance with respective national laws and regulations of their countries as well as the international agreement to which their countries are party.
2. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through

separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE 6 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any matter arising on the interpretation or implementation from this Agreement shall be settled amicably between the Parties.

ARTICLE 7 AMENDMENTS

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written notification of the fulfillment of necessary internal state procedures by the Parties.

ARTICLE 8 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal states procedures, necessary for the entry into force of this Agreement.
2. Any previous cooperation between the Parties remain valid under this Agreement, unless those cooperation are incompatible with the spirit of any provisions of this Agreement.
3. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.

4. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any activities that were ongoing prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

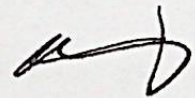
DONE at Pampanga, on this 23 day of, October 2017 in the Indonesian, Khmer and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,



RYAMIZARD RYACUDU
MINISTER OF DEFENCE

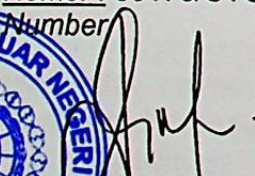
FOR THE ROYAL GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF CAMBODIA,



SAMDECH PICHEYSENA TEA BANH
DEPUTY PRIME MINISTER,
MINISTER OF NATIONAL DEFENCE

Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor : 00176/CTC/09/2022/52
Number




Sahadatun Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 7 September 2022
Date